

*Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu Dan
Keamanan Hasil Perikanan
Semarang*



Laporan Keuangan
Untuk Periode 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Semarang, 2 Januari 2024
Kepala,

Sokhib, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	62
VI. Lampiran dan Daftar	-

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG**
JALAN DR. Suratmo Nomor 28 Kelurahan Kembangarum Semarang 50183
TELEPON 024 76671020, FAXIMILE 024 3541769

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 2 Januari 2024

Kepala,



Sokhib, S.Pi, M.P

Laporan Keuangan Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.344.187.537,- atau mencapai 109 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.141.980.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.571.403.218,- atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.961.734.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.743.832.469,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp484.372.490,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp25.259.459.979,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp31.470.937,- dan Rp25.712.361.532,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.123.010.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp0,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-10.664.509.511,-. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-10.676.462.235,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp25.504.915.974,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-10.676.462.235,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.883.907.793,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp25.712.361.532,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.141.980.000	2.344.187.537	109,44	2.125.676.446
JUMLAH PENDAPATAN		2.141.980.000	2.344.187.537	109,44	2.125.676.446
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6.447.237.000	6.377.748.042	98,92	5.739.706.357
Belanja Barang	B.4	5.782.759.000	5.629.388.458	97,35	4.606.374.178
Belanja Bantuan Sosial	B.5	731.738.000	564.266.718	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		12.961.734.000	12.571.403.218	96,99	10.346.080.535
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		12.961.734.000	12.571.403.218	96,99	10.346.080.535

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG NERACA PER 31 Desember 2023 DAN TA. 2022

URAIAN	CAT	31 Des 2023	TA.2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	484.372.490	415.981.890
Jumlah Aset Lancar		484.372.490	415.981.890
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	11.245.460.361	10.645.460.361
Peralatan dan Mesin	C.14	13.232.232.720	12.354.117.283
Gedung dan Bangunan	C.15	14.222.100.672	14.222.100.672
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	32.847.675	32.847.675
Aset Tetap Lainnya	C.17	15.505.000	15.505.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(13.488.686.449)	(12.140.832.326)
Jumlah Aset Tetap		25.259.459.979	25.129.198.665
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.22	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		25.743.832.469	25.545.180.555
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	31.470.937	40.264.581
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.470.937	40.264.581
JUMLAH KEWAJIBAN		31.470.937	40.264.581
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	25.712.361.532	25.504.915.974
JUMLAH EKUITAS		25.712.361.532	25.504.915.974
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.743.832.469	25.545.180.555

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 30 Des 2022

URAIAN	CAT	31 DES 2023	31 DES 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.330.215.000	2.123.010.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.330.215.000	2.123.010.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.364.689.042	5.730.365.273
Beban Persediaan	D.3	229.760.270	221.978.871
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.299.870.095	2.898.811.688
Beban Pemeliharaan	D.5	562.075.832	462.196.709
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.506.267.845	953.770.404
Beban Brng utk Diserahkan kpda Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.032.061.427	1.311.794.445
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		12.994.724.511	11.578.917.390
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(10.664.509.511)	(9.455.907.390)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan pelepasan aset non lancar		5.123.456	-
Beban pelepasan aset non lancar		7.235.939	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT pelepasan aset non lancar		(2.112.483)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.13		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.849.081	2.613.115
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		18.689.322	25.257.416
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(9.840.241)	(22.644.301)
Jumlah Surplus/defisit dari kegiatan non		(11.952.724)	(22.644.301)
SURPLUS/DEFISIT LO		(10.676.462.235)	(9.478.551.691)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	CATATAN	31 DES 2023	30 DES 2022
EKUITAS AWAL	E.1	25.504.915.974	26.714.403.960
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10.676.462.235)	(9.478.551.691)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	4.862.266
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	266
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.883.907.793	8.264.201.439
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	207.445.558	(1.209.487.986)
EKUITAS AKHIR	E.6	25.712.361.532	25.504.915.974

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan DR. Soeratmo no.28 Kelurahan Kembangarum Semarang .

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang.
- Membina secara efektif Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

Dan Hasil Perikanan Semarang dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas

pelaporan dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak	10%

	dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 12 (Dua Belas) kali. Hal ini disebabkan adanya perubahan/ pergeseran jumlah anggaran biaya antar komponen untuk meningkatkan efektifitas, kualitas belanja, dan peningkatan akuntabilitas:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	2.141.980.000	2.141.980.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	2.141.980.000	2.141.980.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.801.186.000	6.447.237.000
Belanja Barang	5.782.759.000	5.782.759.000
Belanja Modal	1.231.738.000	731.738.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	12.815.683.000	12.961.734.000

Realisasi

Pendapatan
Rp2.344.187.537,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang untuk 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.344.187.537,- atau mencapai 109 persen dari estimasi anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.141.980.000,- dengan rincian penerimaan dalam negeri yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari Pendapatan Jasa yang berasal dari pendapatan jasa karantina perikanan sebesar Rp14.960.000,- , Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Rp.2.315.255.000,- pendapatan jasa lainnya yang merupakan penerimaan kembali

belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp8.849.081- ,
 penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp.0,-
 dan pendapatan penjualan peralatan dan mesin Rp.5.123.456,-

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Karantina	6.400.000	14.960.000	233,74
Pendapatan Pengujian	2.135.580.000	2.315.255.000	108,40
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan	-	-	-
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	8.849.081	-
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin		5.123.456	
Jumlah	2.141.980.000	2.344.187.537	109,43

Realisasi Pendapatan Jasa Karantina dan pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 10.28 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lalulintas produk perikanan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REAL 31 Des 2023	REAL 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina	14.960.000	12.880.000	16,15
Pendapatan Pengujian	2.315.255.000	2.110.130.000	9,72
Pendapatan dri pemindahtanganan BMN	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda penyelesaian pekerjaan	-	-	#DIV/0!
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	8.849.081	446.446	1882,12
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	5.123.456	2.220.000	130,79
Jumlah	2.344.187.537	2.125.676.446	10,28

Realisasi
Belanja Negara
Rp12.571.403.
218,-

B.2 Belanja

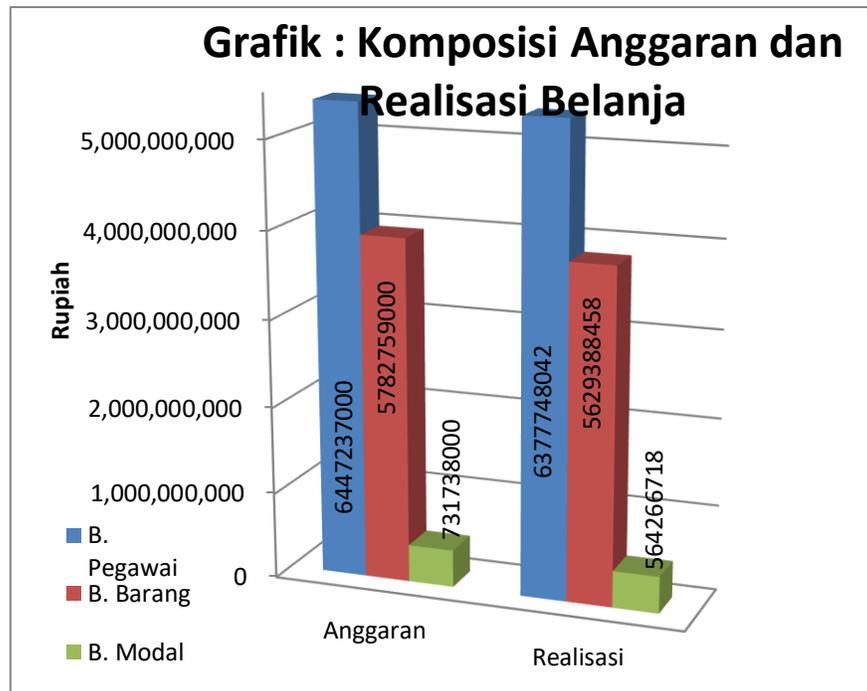
Realisasi Belanja Negara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.571.403.218,- atau 96.99 persen dari anggaran belanja sebesar Rp12.961.734.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

Uraian	31-Des-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.447.237.000	6.377.748.042	98,92
Belanja Barang	5.782.759.000	5.629.388.458	97,35
Belanja Modal	731.738.000	564.266.718	77,11
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	12.961.734.000	12.571.403.218	96,99
Pengembalian	-	401.655	-
Jumlah	12.961.734.000	12.571.804.873	96,99

Realisasi bruto per 31 Desember 2023 sebesar Rp.12.571.804.873,- terdapat pengembalian sebesar Rp.401.655,- sehingga realisasi netto sebesar Rp.12.571.403.218,-. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran 31 Desember 2022 terdapat kenaikan sebesar 21.51% dikarenakan pada tahun 2023 pagu anggaran mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 21.51% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

- Realisasi mengalami kenaikan sebesar 21.51% disebabkan antara lain naiknya realisasi belanja pegawai, Belanja barang dan belanja modal yang dikarenakan naiknya pagu anggaran tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.377.748.042	5.739.706.357	11,12
Belanja Barang	5.629.388.458	4.606.374.178	22,21
Belanja Modal	564.266.718	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	12.571.403.218	10.346.080.535	21,51

*Belanja
Pegawai
Rp6.377.748.0
42,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.377.748.042,- dan Rp5.739.706.357,-. Dengan Jumlah pegawai pada Balai KIPM Semarang sebanyak 52 Pegawai per 31 Desember 2023. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11.12 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat pembayaran tunjangan kinerja tahun 13 dan 14 pada tahun Anggaran 2023.
2. Mutasi pegawai masuk sebanyak 6 pegawai pada Balai KIPM Semarang.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Blnj. Gaji Pokok PNS	2.262.937.800	2.105.286.411	7,49
Blnj. Pembulatan Gaji PNS	32.120	29.953	7,23
Blnj. Tunj. Suami/Istri PNS	151.529.980	146.157.972	3,68
Blnj. Tunj. Anak PNS	54.983.124	51.272.024	7,24
Blnj. Tunj. Struktural PNS	53.100.000	30.060.000	76,65
Blnj. Tunj. Fungsional PNS	184.315.000	179.280.000	2,81
Blnj. Tunj. PPh PNS	5.862.010	6.621.915	(11,48)
Blnj. Tunj. Beras PNS	134.411.520	126.952.260	5,88
Blnj. Uang Makan PNS	354.487.000	331.832.000	6,83
Blnj. Tunj. Umum PNS	28.695.000	28.465.000	0,81
Blnj. Uang Lembur	52.041.000	30.303.000	71,74
Blnj. Tunj. Khusus / Kegiatan PNS	3.095.755.143	2.703.445.822	14,51
Realisasi Belanja Bruto	6.378.149.697	5.739.706.357	11,12
Pengembalian Belanja	(401.655)	-	-
Realisasi Belanja Netto	6.377.748.042	5.739.706.357	11,12

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022, realisasi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11.12% dikarenakan terdapatnya mutasi masuk pegawai pada tahun 2023.

Belanja Barang
Rp5.629.388.458,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.629.388.458,- dan Rp4.606.374.178,-. Realisasi belanja barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,21% dari realisasi belanja barang 31 Desember 2022.

*Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022*

URAIAN	31 Des 2023	30 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.888.265.312	1.530.009.039	23,42
Belanja Barang Non Operasional	342.289.218	213.378.171	60,41
Belanja Jasa	1.065.050.209	1.150.245.631	(7,41)
Belanja Pemeliharaan	550.649.667	454.206.749	21,23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.506.267.845	953.770.404	57,93
Belanja Barang untuk persediaan.	276.866.207	304.764.184	(9,15)
Jumlah Belanja Kotor	5.629.388.458	4.606.374.178	22,21
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	5.629.388.458	4.606.374.178	22,21

Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 22.21% disebabkan meningkatnya realisasi perjalanan dinas, belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan pada tahun 2023

Belanja Modal
Rp564.266.718
,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp564.266.718,- dan Rp0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Dikarenakan tidak terdapat pagu belanja modal pada tahun 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.266.718	-	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	564.266.718	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	564.266.718	0	#DIV/0!

Realisasi Belanja modal Balai KIPM Semarang mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Belanja Modal Tanah Rp0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2023	30 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp564.266.718
,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp564.266.718,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 100%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.266.718	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	564.266.718	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
Jumlah Belanja	564.266.718	0	#DIV/0!

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
		(Unit)	(Rp)
1	Ph Meter	1	11.600.000
2	Lemari Besi	3	8.724.790
3	Kursi Besi	10	15.390.000
4	Mesin Pengering Tangan	5	8.314.550
5	Tempat Sampah	3	6.762.378
6	Autoclave	1	123.866.000
7	Refrigerator	1	4.149.000
8	Bacteriological Colony Counter	1	207.000.000
9	Micropipette	1	23.000.000
10	Hot Plate Stirer	1	16.420.000
11	PC Unit	8	99.200.000
12	Laptop	2	28.840.000
13	Printer	4	11.000.000
Jumlah		41	564.266.718

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Des 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung & Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Perjalanan Gedung & Bangunan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	
Jumlah Belanja	-	-	#DIV/0!

Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada penambahan pada belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk laporan yang berakhir 31 Desember 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,00*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya untuk laporan yang berakhir 30 Desember 2023.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat belanja bantuan sosial di Balai KIPM Semarang.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
BP Kas	-	-
BP Uang Muka/Voucher	-	-
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Pendapatan Jasa yang berasal dari pendapatan jasa karantina perikanan.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022*

Keterangan	31-Dec-23	31 Des 2022
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP yang ada direkening Bendahara maupun uang tunai di berangkas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Kas lainnya dan setara kas pada 31 Desember 2023 senilai Rp.0,-

*Piutang PNB
Rp0,00*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Nama	31 Des 2023	31 Des 2022
	-	-	-
	Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah **piutang** yang berasal dari penerimaan negara **bukan pajak** yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan, penyisihan piutang tidak tertagih – Piutang Bukan Pajak sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

Belanja Dibayar di Muka Rp0,00

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp484.372.490,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp484.372.490,- dan Rp415.981.890,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Des 2023	TA.2022
Barang Konsumsi	23.000.014	38.275.841
Barang untuk Pemeliharaan	-	1.400.000
Suku Cadang	31.320.635	34.790.385
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan Baku	430.051.841	341.515.664
Jumlah	484.372.490	415.981.890

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Debitur	31 Des 2023	31 Des 2022
	-	-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Debitur	31 Des 2023	31 Des 2022
	-	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp11.245.460.361,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.11.245.460.361,- dan Rp10.645.460.361,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	10.645.460.361
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah	600.000.000
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Dest 2023	11.245.460.361

Terdapat mutasi tambah pada 31 Desember 2023 senilai Rp.600.000.000,-. Berupa tanah dengan luas 600m² terletak di lokasi desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasuram, Kabupaten Sukoharjo.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	604 m2	JL. Dr. Soeratmo kav 324 semarang	4.374.780.000
2	1528 m2	JL. Dr. Soeratmo rt 01 rw 08 semarang	6.270.680.361
3	600 m2	Desa Ngabean, Kec Kartasura, Kab Sukoharjo	600.000.000
Jumlah			11.245.460.361

Tanah seluas 2.732 m2 yang terletak di Jalan Dr. Soeratmo Semarang dan Desa Ngabean, Kec. Kartasura, Kab Sukoharjo, pada tanggal pelaporan tidak dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan Mesin
Rp13.232.232.720,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.13.232.232.720,- dan Rp.12.354.117.283,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	12.354.117.283
Mutasi tambah:	
Pembelian	564.266.718
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	911.750.820
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang/ transfer keluar	(197.500.000)
Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerin	(400.402.101)
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	13.232.232.720
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	(11.629.462.481)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.602.770.239

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai KIPM Semarang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.232.232.720,-. Jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal per 31 Desember 2022 Audited sebesar Rp. 12.354.117.283,- terdapat Mutasi tambah selama periode TA. 2023 senilai Rp.1.476.017.538,- yang terdiri dari pembelian senilai Rp.564.266.718,- dan transfer masuk senilai Rp.911.750.820,- ,koreksi bertambah senilai Rp.0,- dan mutasi berkurang senilai Rp.597.902.101,- yang terdiri dari transfer keluar senilai Rp.197.500.000,- dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp.400.402.101,-.

Rincian pembelian Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi aset sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
		(Unit)	(Rp)
1	Ph Meter	1	11.600.000
2	Lemari Besi	3	8.724.790
3	Kursi Besi	10	15.390.000
4	Mesin Pengering Tangan	5	8.314.550
5	Tempat Sampah	3	6.762.378
6	Autoclave	1	123.866.000
7	Refrigerator	1	4.149.000
8	Bacteriological Colony Counter	1	207.000.000
9	Micropipette	1	23.000.000
10	Hot Plate Stirer	1	16.420.000
11	PC Unit	8	99.200.000
12	Laptop	2	28.840.000
13	Printer	4	11.000.000
Jumlah		41	564.266.718

Gedung dan
Bangunan
Rp14.222.100.672,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.222.100.672,- dan Rp14.222.100.672,- . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	14.222.100.672
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan bangunan dan gedung	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Akibat Koreksi	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari Penggunaan	-
Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	14.222.100.672
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.843.589.633)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	12.378.511.039

Rincian Nilai Aset Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Gedung dan Bangunan	Rp 14.222.100.672	Rp 14.222.100.672
	Jumlah	Rp 14.222.100.672	Rp 14.222.100.672
	Akumulasi Penyusutan	Rp (1.843.589.633)	Rp (1.409.065.384)
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp 12.378.511.039	Rp 12.813.035.288

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp32.847.675,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp32.847.675,- dan Rp32.847.675,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	32.847.675
Mutasi tambah:	
Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Des 2023	32.847.675
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	15.634.335
Nilai Buku per 31 Des 2023	48.482.010

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akum Peny	Nilai Buku
A	Jalan				
-	Jalan & Jembatan	0	-	-	-
B	Irigasi				
-	Bangunan Air	0	-	-	-
C	Jaringan				
-	Instalasi da	3	32.847.675	15.634.335	17.213.340
	Total		32.847.675	15.634.335	17.213.340

Rincian Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 32.847.675	Rp 32.847.675
	Jumlah	Rp 32.847.675	Rp 32.847.675
	Akumulasi Penyusutan	Rp 15.634.335	Rp (14.186.826)
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp 48.482.010	Rp 18.660.849

Aset Tetap Lainnya
Rp15.505.000,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp15.505.000,00. Aset tetap lainnya sebanyak 45 unit dengan nilai sebesar Rp15.505.000,00 yang tidak terdapat mutasi tambah / mutasi kurang sampai dengan periode 31 Desember 2023. Aset Tetap Lainnya tersebut tidak berstatus sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau tidak sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan dan juga tidak terdapat Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Aset Tetap Lainnya tersebut masih dalam kondisi baik dan disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.505.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Des 2023	15.505.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2023	-
Nilai Buku per 31 Des 2023	15.505.000

Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Tetap Lainnya	Rp 15.505.000	Rp 15.505.000
	Jumlah	Rp 15.505.000	Rp 15.505.000
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp 15.505.000	Rp 15.505.000

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Saldo Per 1 Januari 2023	Rp	-
Mutasi Tambah :		
	Rp	-
Jumlah Penambahan	Rp	-
Mutasi Kurang :		
- Nihil	Rp	-
Jumlah Pengurangan	Rp	-
Saldo Per 31 Des 2023	Rp	-
nilai Buku Per 31 Des 2023	Rp	-
Nilai Buku Per 31 Des 2023	Rp	-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp13.488.686.449,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp13.488.686.449,- dan Rp12.140.832.326,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	11.245.460.361	-	11.245.460.361
2	Peralatan dan Mesin	13.232.232.720	11.629.462.481	1.602.770.239
3	Gedung dan Bangunan	14.222.100.672	1.843.589.633	12.378.511.039
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.847.675	15.634.335	17.213.340
5	Aset Tetap Lainnya	15.505.000		15.505.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0		0
	Jumlah	38.748.146.428	13.488.686.449	25.259.459.979

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Des 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Des 2023	-
Nilai Buku per 31 Des 2023	-

Rincian Nilai Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
1	Software	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp -	Rp -

Aset Lain-Lain Rp0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp0,- dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional entitas.

Adapun aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Des 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Des 2023	-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	-
Aset Lain-Lain	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesarRp.0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp31.470.937,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.31.470.937,- dan Rp.40.264.581,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Belanja Langganan Listrik	28.866.207
Belanja Langganan Telepon	346.730
Belanja Langganan Internet	1.443.000
Belanja Langganan Air	815.000
Uang Makan	-
Jumlah	31.470.937

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0,00*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Dibayar Dimuka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,00*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31-Des-23	TA.2022
-	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp25.712.361.532,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.25.712.361.532,- dan Rp.25.504.915.974,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp2.330.215.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.330.215.000,- dan Rp2.123.010.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.330.215.000	2.123.010.000	9,76
Jumlah	2.330.215.000	2.123.010.000	9,76

Pendapatan Jasa berasal yang diperoleh dari pelayanan (jasa) karantina dan pendapatan pengujian sertifikasi kalibrasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang yang telah disetor ke negara sebesar Rp.2.330.215.000,-.

Beban Pegawai
Rp6.364.689.042,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.364.689.042,- dan Rp5.730.365.273,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.262.937.800	2.103.880.611	7,56
Beban Perbulatan Gaji PNS	30.465	29.953	1,71
Beban Tunj suami istri	151.529.980	146.124.912	3,70
Beban Tunjangan anak	54.983.124	51.258.800	7,27
Beban Tunj Struktural	53.100.000	30.060.000	76,65
Beban Tunj Fungsional	183.915.000	179.280.000	2,59
Beban Tunj Pph PNS	5.862.010	6.621.915	-11,48
Beban Tunj Beras	134.411.520	126.952.260	5,88
Beban Uang Makan	341.428.000	323.943.000	5,40
Beban Tunj Umum	28.695.000	28.465.000	0,81
Beban Uang Lembur	52.041.000	30.303.000	71,74
Beban Pegawai(tunj khusus)	3.095.755.143	2.703.445.822	14,51
Jumlah	6.364.689.042	5.730.365.273	11,07

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022, realisasi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,07 dikarenakan terdapat mutase tambah pegawai ke Balai KIPM Semarang.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp229.760.270,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp229.760.270,- dan Rp221.978.871,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022*

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	96.029.352	88.808.855	8,12
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	133.730.918	133.170.016	0,41
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah	229.760.270	221.978.871	3,50

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.299.870.095,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.299.870.095,- dan Rp2.898.811.688,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan dalam mendukung tupoksi pelayanan perkarantinaan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.547.134.238	1.265.364.709	22,27
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31.967.082	11.326.600	182,23
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.572.242	7.736.391	36,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	196.104.000	195.132.000	0,50
Beban Barang Operasional Lainnya	102.487.750	48.357.100	111,94
Beban barang operasional -penanganan pandemi Covid	-	3.535.239	(100,00)
Beban Bahan	285.529.218	163.831.171	74,27
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	9.160.000	(10,92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	48.600.000	40.387.000	20,34
Beban barang non operasional - penanganan pandemi Covid			#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	328.033.372	266.681.520	23,01
Beban Langganan Telepon	4.427.227	4.210.727	5,14
Beban Langganan Air	6.712.425	6.949.871	(3,42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	208.413.000	(100,00)
Beban Jasa Pos dan Giro			#DIV/0!
Beban Sewa	91.422.500	122.429.500	(25,32)
Beban Jasa Profesi	66.000.000	39.600.000	66,68
Belanja Jasa Lainnya	572.720.041	498.612.860	14,87
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	-	7.084.000	(99,99)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin			#DIV/0!
Jumlah	3.299.870.095	2.898.811.688	13,84

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023, realisasi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.84%.

*Beban
Pemeliharaan
Rp562.075.832,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp562.075.832,- dan Rp462.196.709,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.557.500	197.280.750	21,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287.199.577	242.270.199	18,54
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	14.783.425	8.266.475	78,84
Beban Persediaan Suku Cadang	19.535.330	14.379.285	35,87
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	562.075.832	462.196.709	155,17

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.506.267.845,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.506.267.845,- dan Rp953.770.404,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.136.671.069	817.438.230	39,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.550.000	79.050.000	89,18
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	7.750.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220.046.776	49.532.174	344,25
Jumlah	1.506.267.845	953.770.404	57,93

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023, realisasi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 57.93%.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Balai KIPM Semarang:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2023	30 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat bantuan sosial pada Balai KIPM Semarang

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	TH 2022	% NAIK (TURUN)
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.032.061.427,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.032.061.427,- dan Rp1.311.794.445,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	741.413.589	1.021.146.607	(27,39)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	289.682.832	289.682.832	-
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	965.006	965.006	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan dan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	1.032.061.427	1.311.794.445	(21,32)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.032.061.427	1.311.794.445	(21,32)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0- dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp-11.952.724,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Jumlah Beban dari Kegiatan non oprasional lainnya	18.689.322	25.257.416	(26,00)
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	8.849.081	2.613.115	238,64
Jumlah surplus defisit pelepasan aset non lancar	(2.112.483)	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(11.952.724)	(22.644.301)	(47,21)

*)Pendapatan/ BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan

penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp25.504.915.974,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.504.915.974,- dan Rp26.714.403.960,-.

Defisit LO

Rp-10.676.462.235,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-10.676.462.235,- dan Rp-9.478.551.691,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp. 4.862.000,00,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Penambahan Saldo Awal	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,-*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp266,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Lain-lain	266
Jumlah	266

*Transaksi Antar
Entitas
Rp10.883.907.793,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.883.907.793,- dan Rp8.264.201.439,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.344.187.537)
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.571.403.218
Transfer Masuk	69.368.492
Transfer Keluar	(12.676.380)
Pengesahan Hibah Langsung	600.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	10.883.907.793

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember

2023, DDEL sebesar Rp2.344.187.537,- sedangkan DKEL sebesar Rp12.571.403.218,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp69.368.492,- terdiri dari:

No	Uraian	Nilai
1	Sertifikat HC	69.368.492
		69.368.492

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.676.380,-.

No	Uraian	Nilai
1	Sertifikat HC	12.676.380
2		

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp600.000.000,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk laporan yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provisi Jawa Tengah	Tanah 600m2	600,000,000
Total Pengesahan			600,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			600.000.000

Ekuitas Akhir
Rp25.712.361.532,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.712.361.532,- dan Rp25.504.915.974,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

A.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Balai KIPM Semarang

A.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Terdapat Akrua atau tagihan Bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir antara lain tagihan Internet sebesar Rp. 1.443.000,-, Tagihan Listrik sebesar Rp. 28.866.207,-, Tagihan Air sebesar Rp. 815.000,- dan Tagihan Telp sebesar Rp.346.730,-
- Terdapat hibah BMN dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah seluas 600m² dengan nilai perolehan Rp.600.000.000,- di Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

DOKUMEN PENDUKUNG

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 12:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	12,571,403,218
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,344,187,537	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,123,456
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,315,255,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,960,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,849,081
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,262,937,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,120	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	151,529,980	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,983,124	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,100,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	184,315,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,862,010	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	134,411,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	354,487,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,695,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	52,041,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,095,755,143	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,547,134,238	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	31,967,082	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,572,242	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	196,104,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	102,487,750	0
3.0	521211	Belanja Bahan	285,529,218	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	48,600,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,438,990	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	244,427,217	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	323,941,159	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,416,584	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,549,925	0
3.0	522141	Belanja Sewa	91,422,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	66,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	572,720,041	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240,557,500	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22,892,590	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287,199,577	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 12:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,136,671,069	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149,550,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220,046,776	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564,266,718	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,655
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	400,000
JUMLAH			14,915,992,410	14,915,992,410

Keterangan :

FINAL

Semarang, 29 Januari 2024

Kepala Pengguna Anggaran

Kuasaku Pengguna Anggaran



SOHIB

198806181989031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 12:00 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	23,000,014	0
0.0	117114	Suku Cadang	31,320,635	0
0.0	117131	Bahan Baku	430,051,841	0
0.0	131111	Tanah	11,245,460,361	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	13,232,232,720	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	14,222,100,672	0
0.0	134113	Jaringan	32,847,675	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,505,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,629,462,481
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,843,589,633
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	15,634,335
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	31,470,937
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	12,571,403,218
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,344,187,537	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,676,380	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	69,368,492
0.0	391111	Ekuitas	0	25,504,915,974
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	600,000,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,123,456
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,315,255,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,960,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,849,081
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,262,937,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	30,465	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	151,529,980	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	54,983,124	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	53,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	183,915,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,862,010	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	134,411,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	341,428,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	28,695,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	52,041,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,095,755,143	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,547,134,238	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31,967,082	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,572,242	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	196,104,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 12:00 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	102,487,750	0
3.0	521211	Beban Bahan	285,529,218	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	48,600,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	328,033,372	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,427,227	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,712,425	0
3.0	522141	Beban Sewa	91,422,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	66,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	572,720,041	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240,557,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287,199,577	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,136,671,069	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	149,550,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220,046,776	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	741,413,589	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	289,682,832	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	965,006	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	96,029,352	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	14,783,425	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	19,535,330	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	133,730,918	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	7,235,939	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	18,689,322	0
JUMLAH			54,610,032,607	54,610,032,607

Keterangan :

FINAL



LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 11:47 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,330,215,000	2,123,010,000	207,205,000	9.76
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,330,215,000	2,123,010,000	207,205,000	9.76
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,330,215,000	2,123,010,000	207,205,000	9.76
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,364,689,042	5,730,365,273	634,323,769	11.07
Beban Persediaan	229,760,270	221,978,871	7,781,399	3.505
Beban Barang dan Jasa	3,299,870,095	2,898,811,688	401,058,407	13.835
Beban Pemeliharaan	562,075,832	462,196,709	99,879,123	21.61
Beban Perjalanan Dinas	1,506,267,845	953,770,404	552,497,441	57.928
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 11:47 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,032,061,427	1,311,794,445	(279,733,018)	(21.324)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	12,994,724,511	11,578,917,390	1,415,807,121	12.227
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,664,509,511)	(9,455,907,390)	(1,208,602,121)	12.781
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,112,483)	0	(2,112,483)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5,123,456	0	5,123,456	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7,235,939	0	7,235,939	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9,840,241)	(22,644,301)	12,804,060	(56.544)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,849,081	2,613,115	6,235,966	238.641
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18,689,322	25,257,416	(6,568,094)	(26.005)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(11,952,724)	(22,644,301)	10,691,577	(47.215)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,676,462,235)	(9,478,551,691)	(1,197,910,544)	12.638
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,676,462,235)	(9,478,551,691)	(1,197,910,544)	12.638

Keterangan :

FINAL



20 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

181989031003

181989031003

181989031003

181989031003

181989031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG 649661

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 11:56 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	12,961,734,000	12,571,403,218	(390,330,782)	97	10,429,999,000	10,346,080,535	(83,918,465)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Semarang, 29 Januari 2024
Wenanggung Jawab UAKPA
Dana Pengguna Anggaran



SOKHIB
0606181989031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 11:59 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	484,372,490	415,981,890	68,390,600	16.44
JUMLAH ASET LANCAR	484,372,490	415,981,890	68,390,600	16.44
ASET TETAP				
Tanah	11,245,460,361	10,645,460,361	600,000,000	5.64
Peralatan dan Mesin	13,232,232,720	12,354,117,283	878,115,437	7.11
Gedung dan Bangunan	14,222,100,672	14,222,100,672	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	32,847,675	32,847,675	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	15,505,000	15,505,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,488,686,449)	(12,140,832,326)	(1,347,854,123)	11.10
JUMLAH ASET TETAP	25,259,459,979	25,129,198,665	130,261,314	0.52
JUMLAH ASET	25,743,832,469	25,545,180,555	198,651,914	0.78
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	31,470,937	40,264,581	(8,793,644)	(21.84)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31,470,937	40,264,581	(8,793,644)	(21.84)
JUMLAH KEWAJIBAN	31,470,937	40,264,581	(8,793,644)	(21.84)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,712,361,532	25,504,915,974	207,445,558	0.81
JUMLAH EKUITAS	25,712,361,532	25,504,915,974	207,445,558	0.81
JUMLAH EKUITAS	25,712,361,532	25,504,915,974	207,445,558	0.81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,743,832,469	25,545,180,555	198,651,914	0.78

Keterangan :

FINAL



Semarang, 29 Januari 2024

Pangung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

SOKHIB

006181989031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (649661) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 11:53 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	25,504,915,974	26,714,403,960	(1,209,487,986)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,676,462,235)	(9,478,551,691)	(1,197,910,544)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	4,862,266	(4,862,266)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	4,862,000	(4,862,000)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	266	(266)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,883,907,793	8,264,201,439	2,619,706,354	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	207,445,558	(1,209,487,986)	1,416,933,544	-
EKUITAS AKHIR	25,712,361,532	25,504,915,974	207,445,558	-

Keterangan :

FINAL





**BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**



NOMOR : 030/0017086/XI/2023
NOMOR : 36/SI/PL-750/XI/2023

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *November* tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARNO, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SETYAWATI, S.Sos., M.Ak., CFrA. : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menindaklanjuti Naskah Hibah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Untuk Kantor dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Dengan Cara Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan Objek Hibah berupa tanah kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Tanah
Kode Barang : 11.01.11.24.030101.00000.00000.1997-1.3.1.01.04.001.000001
Status Tanah : Hak Pakai No. 6
an. Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah

Lokasi : Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
 Luas : ± 600m²
 Nilai Perolehan : Rp 600.000.000,-
 Tahun Pengadaan : 1997
 Pengguna Barang : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
 Peruntukan : Kantor dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang

2. PIHAK KESATU melepaskan segala Hak dan Kewajiban atas tanah yang dihibahkan sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara untuk Kepentingan PIHAK KEDUA.
3. Berita Acara Serah Terima ini, merupakan dasar Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 oleh PIHAK KESATU dan merupakan dasar Pencatatan oleh PIHAK KEDUA.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara Serah Terima, dibuat rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk minute, dan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk PARA PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


 SETYAWATI, S.Sos., M.Ak., CFrA.

PIHAK KESATU


 SUMARNO, S.E., M.M.



LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BMD PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH KEPADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

NOMOR : 030/0017086/XI/2023

TANGGAL : 23 Nopember 2023

DENAH LOKASI
BMD PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIPINDAHTANGANKAN
KEPADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI



PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


SETYAWATI, S.Sos., M.Ak., CFrA.


SUMARNO, S.E., M.M.



NASKAH HIBAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI



NOMOR: 030/0017085/XI/2023
 NOMOR: 360/SJ/PL-750/XI/2023

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA
 TANAH KEPADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 UNTUK KANTOR DAN LABORATORIUM BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
 MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG DENGAN CARA HIBAH

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *November* tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUMARNO, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SETYAWATI, S.Sos., M.Ak., CFA. : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK dengan mendasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

- Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/120 Tahun 2023 Tanggal 4 September 2023 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Untuk Kantor Dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Dengan Cara Hibah;
 10. Surat Kepala Balai KIPM Semarang Nomor 839/17.0/PL.210/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 Hal Permohonan Hibah Tanah dan Surat Kepala Balai KIPM Semarang Nomor 554/17.0/PL.210/XI/2021 Tanggal 10 November 2021 Hal Tindak Lanjut Permohonan Hibah Tanah;
 11. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah No.4838/SJ.5/PL.820/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakan Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya Hibah ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Hibah ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan operasional pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang wilayah kerja Adi Soemarmo, Surakarta.

Pasal 2
OBJEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan Objek Hibah berupa Tanah kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

Nama	: Tanah
Kode Barang	: 11.01.11.24.030101.00000.00000.1997- 1.3.1.01.04.001. 000001
Status Tanah	: Hak Pakai No. 6 an. Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah
Lokasi	: Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
Luas	: ± 600m ²
Nilai Perolehan	: Rp 600.000.000,-
Tahun Pengadaan	: 1997
Pengguna Barang	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Peruntukan	: Kantor dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mengelola objek yang dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan objek hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap objek yang telah dihibahkan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
 - d. Mencatat dan mendaftarkan objek hibah ke dalam daftar inventaris PIHAK KEDUA;

- (3) PIHAK KEDUA dilarang memanfaatkan dan/atau memindahtangankan objek hibah daerah kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah ini.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban menghapus dari daftar inventaris barang milik daerah yang menjadi objek hibah ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.

Pasal 4
PENYERAHAN OBJEK HIBAH

- (1) Penyerahan Objek Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Hibah ini.
- (2) Penyerahan Barang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan Naskah Hibah ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia serta ditujukan kepada pihak yang ditunjuk pada alamat berikut:

PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah.

PIHAK KEDUA : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang
Jl. Dr. Suratmo No.28, Semarang, Jawa Tengah.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Hibah ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atau negosiasi.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi yang terdiri dari masing-masing satu orang wakil PARA PIHAK dan seorang PIHAK KETIGA yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Naskah Hibah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Hibah ini tunduk pada Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Judul dari Pasal-Pasal dalam Naskah Hibah ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan pegangan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi Pasal-Pasal.

Demikian Naskah Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Hibah ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk *minute*, dan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk PARA PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SETYAWATI, S.Sos., M.Ak., CFrA.

PIHAK KESATU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN Keadilan
METERAI TEMPEL
10000
32075AKX697976680
JAWABAN

SUMARNO, S.E., M.M